

**Framing Pemberitaan Kebijakan Hak Guna Usaha 190
Tahun Ibukota Nusantara pada detik.com Periode Juli –
Agustus 2024 terkait Pembentukan Citra Pemerintah**

*Framing of News on the 190-Year Cultivation Rights Policy in
the Indonesian Capital on detik.com for the July-August 2024
Period related to the Formation of the Government's Image*

Dewi Maria Herawati¹

Aviva Asa Yutika²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi
Alamat: Jl. Sumpah Pemuda Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah 57136
dewimaria86@yahoo.comm

Dikirim: 17 April 2026, Direvisi: 22 Juni 2026, Diterima: 23 Juni
2026, Terbit: 28 Juni 2026. Sitasi: Herawati, D. M., Yutika, A. A.
(2026). Framing Pemberitaan Kebijakan Hak Guna Usaha 190
Tahun Ibukota Nusantara pada detik.com Periode Juli – Agustus
2024 terkait Pembentukan Citra Pemerintah. *Promedia: Public
Relation dan Media Komunikasi*, 12(1), 239-259

Abstract

The policy of granting Land Cultivation Rights (Hak Guna Usaha/HGU) for up to 190 years in the Nusantara Capital City (IKN) has generated public debate due to its connection with investment interests, land control, and the potential for agrarian conflicts. Mass media play an important role in framing this issue, which can influence public perceptions of government policies. This study aims to analyze how the online media outlet Detik.com frames the 190-year HGU policy in IKN and how such framing relates to the construction of the government's image. This research employs the framing analysis model developed by Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki, which examines four structures: syntactic, script, thematic, and rhetorical. A descriptive qualitative approach was used with eight news articles from Detik.com published between July and August 2024 as the research object. Data were collected through documentation,

literature review, and triangulation through interviews with journalists. The findings indicate that Detik.com tends to frame the HGU policy in a legitimitative manner by emphasizing the legal basis of the policy, economic rationality, and the urgency of investment for the development of IKN. Through this framing pattern, Detik.com constructs the image of the government as a rational, pro-investment, and competent actor in managing national development.

Keywords: media framing, HGU policy in IKN, Pan and Kosicki, Detik.com, government image

Abstraksi

Isu pemberian Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan perdebatan publik karena berkaitan dengan kepentingan investasi, penguasaan lahan, serta potensi konflik agraria. Media massa memiliki peran penting dalam membingkai isu tersebut sehingga dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media daring Detik.com membingkai kebijakan HGU 190 tahun di IKN serta keterkaitannya dengan pembentukan citra pemerintah. Penelitian ini menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang meliputi struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan objek penelitian sebanyak 8 berita Detik.com pada periode Juli–Agustus 2024. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, studi pustaka, serta triangulasi melalui wawancara dengan jurnalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Detik.com cenderung membingkai kebijakan HGU secara legitimatif dengan menekankan aspek legalitas kebijakan, rasionalitas ekonomi, serta urgensi investasi dalam pembangunan IKN. Melalui pola framing tersebut, Detik.com membangun citra pemerintah sebagai aktor yang rasional, pro-investasi, dan kompeten dalam mengelola pembangunan.

Kata Kunci: framing media, HGU IKN, Pan dan Kosicki, Detik.com, citra pemerintah

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menjadi salah satu proyek prioritas nasional yang menyita perhatian luas dari masyarakat. Proyek ini tidak hanya berkaitan dengan pemerataan pembangunan, tetapi juga menyangkut kebijakan strategis dalam pengelolaan lahan serta upaya menarik investasi. Salah satu kebijakan yang memicu perdebatan pada tahun 2024 adalah rencana pemberian Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun bagi investor di kawasan IKN.

Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di ruang publik, terutama karena durasi penguasaan lahan yang dinilai sangat panjang. Sejumlah kajian akademik menilai bahwa kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 (Kylie & Azizullah, 2025). Kritik juga disampaikan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menilai bahwa skema tersebut mencerminkan kemunduran dalam tata kelola agraria, bahkan dianggap lebih eksploitatif dibandingkan praktik kolonial yang membatasi konsesi lahan hingga 75 tahun (Asnawi & Sitoningrum, 2024).

Dalam perspektif global, pemberian konsesi lahan jangka panjang memang bukan hal baru, namun umumnya berada pada rentang 50 hingga 99 tahun (HLPE, 2011). Praktik tersebut pun kerap menimbulkan polemik di berbagai negara karena berkaitan dengan penguasaan lahan dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Oleh karena itu, rencana pemberian HGU hingga 190 tahun di IKN dinilai melampaui praktik yang lazim diterapkan secara internasional.

Kontroversi ini juga tidak terlepas dari tingginya konflik agraria di Indonesia. Data KPA mencatat terdapat 718 kasus konflik agraria sepanjang tahun 2023. Selain itu, berbagai

organisasi masyarakat sipil menyoroti potensi dampak sosial dan ekologis dari pembangunan IKN, seperti ancaman terhadap ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan serta kekhawatiran masyarakat adat terkait hilangnya akses terhadap tanah dan sumber daya alam (Welan, 2025).

Perkembangan isu tersebut kemudian menjadi perhatian media massa yang memberitakannya dengan sudut pandang beragam. Dalam kajian komunikasi, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara publik memahami realitas melalui proses framing, yaitu pemilihan fakta, penekanan aspek tertentu, serta penyusunan narasi berita (Zaklama, 2025). Penelitian ini menggunakan model framing yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (1993), yang menganalisis empat struktur teks berita: sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Model ini dipilih karena mampu mengungkap bagaimana makna dikonstruksi secara mendalam melalui elemen-elemen kebahasaan dan struktur narasi dalam pemberitaan.

Berdasarkan penelusuran terhadap 54 berita dari 15 media daring nasional sepanjang tahun 2024, Detik.com termasuk media yang aktif memberitakan isu HGU 190 tahun di IKN dengan total 8 berita. Hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut memiliki nilai berita tinggi karena berkaitan dengan kepentingan publik dan mengandung unsur konflik kebijakan (Ismandianto et al., 2022). Pemilihan Detik.com sebagai objek penelitian didasarkan pada posisinya sebagai salah satu portal berita dengan jangkauan audiens terbesar di Indonesia. Survei (GoodStats, 2024) menunjukkan bahwa sekitar 50% responden mengakses Detik.com setiap minggu, sementara tingkat kepercayaan publik mencapai 69% (Humas, 2023). Selain itu, karakteristik Detik.com sebagai media daring yang mengedepankan kecepatan menjadikannya sebagai rujukan utama dalam memperoleh informasi aktual.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji framing media dalam berbagai konteks, seperti pemberitaan pemindahan IKN di Detik.com (Ramadhani, Teluma, 2025), konstruksi citra pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 pada Kompas.com dan Detik.com (Fauziati, 2021), serta framing dampak lingkungan pemindahan IKN pada CNBCIndonesia.com dan Kompas.com (Insani & Zamzamy, 2023). Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas framing media terhadap kebijakan HGU 190 tahun di IKN serta kaitannya dengan pembentukan citra pemerintah masih terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Detik.com membingkai pemberitaan terkait kebijakan HGU 190 tahun di IKN serta bagaimana framing tersebut berkontribusi dalam membentuk citra pemerintah di ruang publik. Analisis dilakukan menggunakan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang mencakup struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik dalam teks berita.

Dalam komunikasi massa, media berperan menentukan isu yang dianggap penting melalui teori agenda setting (McCombs & Shaw), yaitu dengan menonjolkan isu tertentu sehingga menjadi prioritas perhatian publik. Media tidak langsung memengaruhi cara berpikir, tetapi menentukan apa yang dipikirkan. Proses ini melibatkan hubungan antara agenda media, publik, dan politik (Rogers & Dearing, 1988). Selain itu, media membentuk cara publik memahami peristiwa melalui framing, yaitu proses memilih dan menekankan aspek tertentu dari realitas (Entman, 1993). Penelitian ini menggunakan model Pan & Kosicki yang menganalisis struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik untuk melihat bagaimana makna dibangun dalam berita. Framing juga berkaitan dengan pembentukan citra, yaitu persepsi publik terhadap suatu aktor atau institusi (Jefkins, 1992). Citra dapat bersifat positif, negatif, atau netral. Karena itu, analisis framing pada isu HGU 190 tahun di IKN penting untuk memahami

bagaimana media mengonstruksi makna dan memengaruhi citra pemerintah.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing. Analisis framing dilakukan menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang mengkaji struktur teks berita melalui empat elemen utama, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

Data penelitian berupa teks berita yang dimuat pada Detik.com terkait isu HGU 190 tahun di IKN pada periode Juli–Agustus 2024. Unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari 8 artikel berita yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, membaca, dan pencatatan terhadap teks berita, serta didukung oleh studi literatur dan wawancara dengan seorang jurnalis dari Media Indonesia sebagai bentuk triangulasi data.

III. PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan

1. Analisis berita ke-1 Detik.com Edisi 12 Jul 2024.

Judul: “Investor IKN Bisa Dapat HGU Lahan Sampai 190 Tahun”

Berita Detik mengenai kebijakan pemberian HGU hingga 190 tahun bagi investor IKN mbingkai isu ini sebagai langkah strategis pemerintah untuk menarik investasi dan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Melalui struktur sintaksis, berita disusun dengan menonjolkan penjelasan regulasi dan mekanisme hukum secara rinci sehingga kebijakan tampak terencana, sah, dan bebas masalah. Elemen 5W+1H digunakan untuk menegaskan apa kebijakannya dan bagaimana sistem dua siklus HGU

itu bekerja, tanpa menghadirkan sudut pandang kritis atau potensi dampak negatif.

Secara tematik, paragraf dan hubungan antar kalimat diarahkan pada penciptaan narasi bahwa insentif HGU jangka panjang adalah kebutuhan pembangunan dan bagian dari strategi mendorong minat investor. Elemen retorik seperti istilah teknis dan foto ilustrasi pembangunan IKN memperkuat citra bahwa proyek ini nyata, progresif, dan membutuhkan dukungan investasi.

Secara keseluruhan, framing berita ini bersifat pro-pemerintah karena menampilkan kebijakan sebagai langkah ekonomi yang rasional dan menguntungkan, serta tidak membuka ruang bagi perspektif alternatif atau kritik publik terkait isu penguasaan lahan jangka panjang.

2. Analisis berita ke-2 Detik.com Edisi 16 Jul 2024.

Judul: “Jokowi Ungkap Alasan Beri HGU di IKN Sampai 190 Tahun ke Investor”

Secara sintaksis, berita disusun dengan menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai aktor utama dan sumber tunggal. Penyusunan judul, lead, dan kutipan menunjukkan fokus pada penjelasan pemerintah terkait kebijakan HGU di IKN. Informasi disajikan secara deskriptif dan administratif tanpa menghadirkan sumber alternatif.

Struktur skrip dalam berita ini tergolong lengkap karena memenuhi seluruh unsur 5W+1H. Setiap unsur disampaikan secara eksplisit melalui pernyataan resmi pemerintah, sehingga berita berfungsi sebagai penyampai informasi kebijakan kepada publik.

Secara tematik, berita membangun satu tema utama, yaitu penjelasan pemerintah mengenai kebijakan pemberian hak pengelolaan lahan jangka panjang di IKN. Hubungan antarparagraf bersifat linear dan saling mendukung, dengan

fokus yang konsisten pada sudut pandang pemerintah tanpa perluasan ke perspektif lain.

Dari sisi retorik, penggunaan diksi administratif dan visual berupa foto Presiden menegaskan karakter berita sebagai laporan kebijakan publik. Pilihan kata dan elemen visual memperkuat otoritas sumber serta konteks resmi pernyataan yang disampaikan.

3. Analisis berita ke-3 Detik.com Edisi 17 Jul 2024.

Judul: “Blak-blakan Jokowi Banyak Proyek di IKN Mundur - Alasan Beri HGU 190 Tahun”

Analisis framing Pan dan Kosicki terhadap berita “Blak-blakan Jokowi Banyak Proyek di IKN Mundur–Alasan Beri HGU 190 Tahun” menunjukkan bahwa detikFinance membingkai isu keterlambatan pembangunan IKN dan kebijakan HGU jangka panjang dari sudut pandang pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo.

Melalui struktur sintaksis dan skrip, berita ini menempatkan Jokowi sebagai sumber utama yang menjelaskan keterlambatan proyek sebagai hal wajar akibat faktor alam, serta memosisikan kebijakan HGU 190 tahun sebagai strategi rasional untuk menarik investasi. Secara tematik, narasi dibangun secara linear dari persoalan teknis pembangunan menuju pembenaran kebijakan pertanahan, sehingga pembaca diarahkan untuk memahami bahwa pembangunan IKN sangat bergantung pada peran investor. Struktur retorik yang digunakan cenderung netral dan informatif, dengan penekanan pada keterbukaan Presiden, tanpa menghadirkan sudut pandang kritis atau sumber alternatif. Dengan demikian, framing berita ini cenderung mendukung kebijakan pemerintah dan menampilkan keterlambatan pembangunan IKN sebagai persoalan teknis yang dapat dimaklumi.

4. Analisis berita ke- 4 Detik.com Edisi 16 Jul 2024.

Judul: “Joko Widodo Buka Suara Soal Beri Izin HGU untuk Investor IKN hingga 190 Tahun”

Berita Detik tentang pernyataan Presiden Jokowi terkait pemberian HGU hingga 190 tahun membingkai isu ini sebagai kebijakan yang sepenuhnya legal, teratur, dan dibutuhkan untuk menarik investor ke IKN. Melalui struktur sintaksis, berita menonjolkan klarifikasi langsung dari Presiden sebagai sumber utama sehingga memberikan legitimasi kuat terhadap kebijakan tersebut.

Struktur skrip 5W+1H disusun untuk mempertegas bahwa tujuan utama kebijakan adalah mempermudah investasi dan bahwa seluruh mekanismenya sudah diatur jelas dalam Perpres 75/2024. Pada level tematik, paragraf dan hubungan antar kalimat diarahkan untuk membangun pemahaman bahwa kebijakan ini logis, tidak bermasalah, dan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan IKN.

Elemen retorik melalui pilihan kata yang formal serta foto Presiden turut memperkuat citra pemerintah sebagai pihak yang transparan dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, framing berita ini bersifat pro-pemerintah karena menampilkan kebijakan sebagai langkah strategis tanpa menghadirkan perspektif kritis atau potensi dampak negatif, sehingga publik diarahkan melihat HGU jangka panjang sebagai keputusan yang wajar dan menguntungkan bagi pembangunan IKN.

5. Analisis berita ke-5 Detik.com Edisi 13 Jul 2024.

Judul: “Investor Dapat Sederet Insentif Hak Guna Tanah di IKN, Pengembang Minat?”

Berdasarkan analisis struktur framing, berita ini disusun secara sistematis dan relatif seimbang. Dari struktur sintaksis, judul yang berbentuk pertanyaan menunjukkan sikap tidak sepenuhnya afirmatif terhadap kebijakan

insentif, sementara isi berita menyajikan data regulasi dan pendapat narasumber secara berimbang.

Dari struktur skrip, unsur 5W+1H terpenuhi dengan jelas, sehingga informasi mudah dipahami dan runtut. Dari struktur tematik, alur berita bergerak dari penjelasan kebijakan, rincian teknis, hingga respons pengembang, tanpa konflik langsung antarparagraf. Sementara itu, dari struktur retorik, penggunaan bahasa formal, kutipan pasal hukum, serta pernyataan narasumber resmi memperkuat kesan faktual dan kredibel. Secara keseluruhan, berita membingkai kebijakan insentif IKN sebagai peluang investasi yang menjanjikan, namun tetap menyisakan ruang keraguan terkait kepastian pasar dan keberlanjutan investasi.

6. Analisis berita ke-6 Detik.com Edisi 13 Jul 2024.

Judul: “Jurus Baru Jokowi Genjot Proyek IKN: Beri HGU hingga 190 Tahun”

Secara keseluruhan, berita ini membingkai kebijakan pemberian hak atas tanah jangka Panjang termasuk HGU hingga 190 tahun sebagai strategi baru pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN dan meningkatkan minat investor. Struktur sintaksis mengarahkan pembaca untuk melihat isi Perpres sebagai inti kebijakan, dengan penjelasan teknis mengenai wewenang Otorita IKN dan mekanisme pemberian hak tanah.

Melalui struktur skrip, berita menonjolkan aspek apa yang diatur, mengapa kebijakan itu muncul, dan bagaimana pemerintah berupaya menarik investor, sehingga pembaca diarahkan untuk memahami kebijakan sebagai langkah rasional untuk memperkuat proyek IKN.

Struktur tematik memperlihatkan konsistensi fokus pada kebijakan teknis tanpa menghadirkan perspektif kritis atau kontroversial, menghasilkan narasi yang linear dan pro-

pemerintah. Pada struktur retorisi, pilihan istilah legal dan foto Presiden Jokowi bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memperkuat pesan legitimasi dan keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini.

Keseluruhan unsur tersebut membentuk framing bahwa pemerintah sedang mengambil langkah strategis, terukur, dan terkoordinasi untuk menggenjot realisasi pembangunan IKN melalui insentif pertanahan yang dianggap menarik bagi investor.

7. Analisis berita ke-7 Detik.com Edisi 25 Jul 2024.

Judul: “Dosen Unair Soroti Izin Hak Guna Usaha 190 Tahun di IKN”

Berdasarkan struktur sintaksis, berita ini menempatkan kritik akademisi sebagai fokus utama melalui judul dan lead yang langsung menyoroti persoalan izin HGU 190 tahun, sehingga sejak awal pembaca diarahkan untuk melihat kebijakan tersebut sebagai isu bermasalah.

Pada struktur skrip, unsur why dan how lebih ditonjolkan untuk menjelaskan alasan kritik dan potensi dampak kebijakan, sementara unsur manfaat investasi tidak mendapat porsi dominan.

Struktur tematik memperlihatkan konsistensi narasi yang mengalir dari penjelasan kebijakan menuju berbagai risiko hukum dan sosial, dengan hubungan antar kalimat yang saling menguatkan sudut pandang kritis. Sementara itu, pada struktur retorisi, penggunaan istilah evaluatif seperti risiko, konflik, dan ketimpangan penguasaan lahan mempertegas nada kritik, meskipun visual yang ditampilkan bersifat ilustratif dan netral.

Secara keseluruhan, keempat struktur tersebut membentuk framing yang menempatkan kebijakan HGU 190 tahun sebagai kebijakan yang patut dikaji ulang karena

berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sosial di masa depan.

8. Analisis berita ke-8 Detik.com Edisi 25 Jul 2024.

Judul: “Eks Menteri Jokowi Kritik Pembangunan IKN, Singgung HGU Kebablasan”

Berdasarkan analisis framing Pan dan Kosicki, berita ini membingkai kebijakan pemberian HGU hingga 190 tahun di IKN sebagai kebijakan yang berlebihan dan patut dipersoalkan. Pada struktur sintaksis, judul dan lead langsung mengarahkan pembaca pada sudut pandang kritis melalui dominasi suara Andrinof Chaniago.

Struktur skrip menempatkan Andrinof sebagai aktor utama dengan argumentasi rasional tentang tahapan pembangunan dan logika investasi, sementara pemerintah hadir sebagai pihak yang kebijakannya dipersoalkan.

Secara tematik, paragraf-paragraf disusun untuk membangun satu alur logika yang konsisten mendukung kritik, tanpa menghadirkan sudut pandang pembelaan dari pemerintah. Struktur retorik melalui pemilihan diksi evaluatif dan visual narasumber semakin memperkuat kesan bahwa kebijakan HGU jangka panjang di IKN adalah langkah “kebablasan”. Dengan demikian, framing berita ini secara jelas bersifat kritis dan cenderung mendelegitimasi kebijakan pemerintah terkait HGU di Ibu Kota Nusantara.

B. Analisa Hasil

Tabel 1. Rekapitulasi Framing Detik.com Periode Juli - Agustus 2024

Kategori Framing	Jumlah	Persentase
Positif	5	62,5%
Netral-Positif	1	12,5%
Negatif	2	25%
Total	8	100%

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2025

Berdasarkan klasifikasi framing, pemberitaan Detik.com mengenai HGU 190 tahun di IKN didominasi framing positif. Dari delapan berita, lima (62,5%) bersifat positif, satu (12,5%) netral-positif, dan dua (25%) negatif. Secara umum, Detik.com membingkai kebijakan sebagai langkah strategis, rasional, dan diperlukan untuk menarik investasi serta mendukung pembangunan IKN.

Pada struktur sintaksis, sumber utama didominasi Presiden dan pejabat pemerintah, dengan judul dan lead yang menekankan penjelasan resmi. Struktur skrip lebih menonjolkan aspek what, why, dan how dari perspektif pemerintah, sementara dampak sosial dan konflik agraria relatif minim. Secara tematik, berita disusun linier dari penjelasan menuju legitimasi kebijakan. Secara retorik, digunakan bahasa teknokratis dan legal yang memperkuat kesan kebijakan sebagai keputusan profesional dan terukur.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Detik.com cenderung membingkai kebijakan HGU 190 tahun di IKN secara dominan positif dan legitimatif. Kecenderungan ini dapat dijelaskan melalui dua pendekatan teoretis: teori agenda setting (McCombs & Shaw, 1972) dan ekonomi politik media (Mosco, 2009).

Pertama, dari perspektif agenda setting, dominasi sumber pemerintah dalam struktur sintaksis pemberitaan Detik.com menunjukkan bahwa media menetapkan agenda dengan menonjolkan narasi resmi pemerintah sebagai definisi utama atas realitas kebijakan. Ketika judul dan lead berita secara konsisten menampilkan pernyataan Presiden dan pejabat pemerintah tanpa diimbangi perspektif kritis yang setara, media pada dasarnya mentransfer saliansi isu dari agenda pemerintah ke agenda publik. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa media nasional di Indonesia cenderung mengutamakan sumber resmi dan narasi pemerintah dalam

pemberitaan kebijakan strategis (Khotimah, 2019; Setiani & Huda, 2025).

Kedua, dari perspektif ekonomi politik media (Mosco, 2009), kecenderungan framing positif Detik.com tidak dapat dilepaskan dari struktur kepemilikan media tempatnya bernaung. Detik.com merupakan bagian dari Trans Media di bawah CT Corp milik Chairul Tanjung, sebuah konglomerasi yang bergerak di berbagai sektor seperti perbankan, properti, ritel, hingga investasi. Dalam perspektif ekonomi politik, media dalam struktur konglomerasi cenderung menyesuaikan pemberitaannya dengan kepentingan stabilitas pasar dan relasi negara-korporasi (Mosco, 2009).

Konsentrasi kepemilikan media di Indonesia telah menjadi perhatian serius para akademisi. Ambardi et al. (2014) menunjukkan bahwa 12 konglomerat besar menguasai lebih dari 97% pemirsan televisi dan memperluas pengaruhnya ke berbagai platform media. Kondisi ini menciptakan risiko homogenisasi konten dan bias pemberitaan yang menguntungkan kepentingan pemilik. Penelitian tentang kepemilikan media di Indonesia menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpotensi menciptakan bias dalam pemberitaan, di mana media cenderung berpihak pada kepentingan pemiliknya, terutama ketika pemilik memiliki afiliasi politik. Lebih lanjut, media yang terafiliasi dengan konglomerat tertentu menunjukkan kecenderungan bias dalam membingkai berita, yang memengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu politik dan kebijakan.

Dalam konteks Detik.com, tekanan struktural tersebut tidak bersifat langsung (seperti intervensi redaksi dari pemilik), melainkan tercermin dalam kecenderungan redaksi untuk memilih narasi yang aman, administratif, dan tidak konfrontatif. Media daring yang berorientasi pada kecepatan dan trafik, seperti Detik.com, cenderung menyajikan berita secara ringkas, aktual, dan mudah dikonsumsi. Konsekuensinya, pemberitaan lebih

menekankan aspek legal, administratif, dan strategis, sementara perspektif kritis dan suara non-pemerintah muncul secara terbatas. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa media di Indonesia menghadapi tekanan untuk memproduksi konten secepat mungkin dengan biaya serendah mungkin di tengah persaingan ketat.

Mosco (2009) dalam konsep komodifikasi menjelaskan bahwa dalam logika kapitalis media, berita tidak lagi semata-mata diproduksi untuk kepentingan publik, tetapi juga sebagai komoditas yang harus dijual kepada pengiklan dan audiens. Dalam konteks ini, kecenderungan Detik.com untuk mengutamakan sumber resmi—yang mudah diakses, cepat, dan minim risiko—dapat dipahami sebagai strategi produksi berita yang efisien secara ekonomis. Narasi yang aman dan administratif lebih mudah diproduksi dalam waktu singkat dibandingkan dengan liputan investigatif yang memerlukan verifikasi silang dari berbagai sumber dan perspektif.

Implikasi dari framing yang dominan positif ini terhadap pembentukan citra pemerintah cukup signifikan. Melalui pola pemberitaan yang secara konsisten menampilkan kebijakan HGU sebagai langkah rasional, terencana, dan diperlukan, Detik.com mengonstruksi citra pemerintah sebagai aktor rasional, pro-investasi, dan kompeten dalam mengelola pembangunan. Kebijakan HGU diposisikan sebagai solusi strategis untuk menarik investasi dan mengatasi keterbatasan pembiayaan negara, bukan sebagai persoalan sosial yang problematis. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian tentang framing kebijakan pemerintah di media Indonesia, di mana media cenderung memperkuat citra positif pemerintah dan meminimalkan potensi konflik melalui narasi yang harmonis (peneliti, 2025).

Namun demikian, hadirnya dua berita dengan framing negatif (25%) menunjukkan bahwa Detik.com tetap memberikan ruang bagi kritik terhadap kebijakan, meskipun dalam proporsi yang lebih kecil. Berita-berita kritis tersebut umumnya muncul

ketika narasumber berasal dari luar pemerintah (akademisi atau mantan pejabat yang tidak lagi menjabat), yang menunjukkan bahwa akses dan otoritas sumber tetap menjadi faktor penting dalam menentukan framing berita. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa dalam struktur media yang terkonsentrasi, keberagaman perspektif tetap dimungkinkan tetapi cenderung terbatas pada sumber-sumber yang memiliki legitimasi institusional.

Secara keseluruhan, kecenderungan framing ini tidak terlepas dari faktor struktural media. Sebagai bagian dari konglomerasi media dan beroperasi dalam logika media digital berbasis trafik, Detik.com cenderung mengutamakan kecepatan, stabilitas narasi, serta akses terhadap sumber resmi. Akibatnya, ruang untuk menghadirkan perspektif kritis dan konflik kepentingan menjadi terbatas, sehingga framing yang dihasilkan lebih bersifat legitimatif terhadap kebijakan pemerintah.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ardhi, Jurnalis Media Indonesia, yang menyatakan bahwa media pada dasarnya berada dalam tekanan ekonomi karena harus menjaga keberlanjutan operasional melalui pendapatan iklan. Dalam situasi tersebut, redaksi cenderung mengutamakan sumber resmi yang mudah diakses, cepat, dan minim risiko, terutama dalam produksi berita harian yang menuntut kecepatan tinggi.

Informan juga menekankan bahwa idealnya pemberitaan kebijakan publik harus berpijak pada kepentingan publik, berbasis fakta lapangan, serta menghadirkan narasumber yang berimbang. Prinsip *cover both sides* tidak hanya dimaknai sebagai formalitas, tetapi sebagai upaya menghadirkan perspektif alternatif seperti akademisi, masyarakat terdampak, atau kelompok kritis. Namun, dalam praktik media daring yang serba cepat, ruang untuk menghadirkan kedalaman dan keberimbangan tersebut sering kali terbatas oleh tekanan waktu dan kebijakan redaksional.

Sebagai media daring yang berorientasi pada kecepatan dan trafik, Detik.com cenderung menyajikan berita secara ringkas, aktual, dan mudah dikonsumsi. Konsekuensinya, pemberitaan lebih menekankan aspek legal, administratif, dan strategis, sementara perspektif kritis dan suara non-pemerintah muncul secara terbatas. Perbedaan karakter ini juga menunjukkan bahwa media daring cepat lebih mengutamakan kecepatan dan akses sumber resmi, sedangkan media investigatif menekankan kedalaman analisis dan konteks. Dalam konteks ini, framing Detik.com dipengaruhi tidak hanya oleh nilai jurnalistik, tetapi juga oleh logika produksi media digital yang menekankan kecepatan, keamanan narasi, dan keberlanjutan akses terhadap sumber informasi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis framing terhadap delapan berita Detik.com periode Juli–Agustus 2024, penelitian ini menyimpulkan bahwa Detik.com cenderung membingkai kebijakan HGU 190 tahun di IKN secara legitimatif dan administratif. Hal ini terlihat dari dominasi sumber pemerintah dalam struktur sintaksis (62,5% berita bersifat positif), penekanan pada aspek legalitas dan rasionalitas ekonomi dalam struktur skrip, serta penyusunan tematik yang linier dari penjelasan menuju pembenaran kebijakan. Secara retorik, penggunaan bahasa teknokratis semakin memperkuat kesan kebijakan sebagai keputusan profesional dan terukur. Melalui pola tersebut, Detik.com membangun citra pemerintah sebagai aktor rasional, pro-investasi, dan kompeten dalam mengelola pembangunan. Kebijakan HGU diposisikan sebagai solusi strategis untuk menarik investasi dan mengatasi keterbatasan pembiayaan negara, bukan sebagai persoalan sosial yang problematis. Temuan ini memperkuat teori agenda setting (McCombs & Shaw, 1972) bahwa media berperan menentukan isu yang dianggap penting oleh

publik, serta teori ekonomi politik media (Mosco, 2009) bahwa struktur kepemilikan dan logika komodifikasi media memengaruhi kecenderungan pemberitaan.

Kecenderungan framing ini tidak terlepas dari faktor struktural media. Sebagai bagian dari konglomerasi media CT Corp dan beroperasi dalam logika media digital berbasis trafik, Detik.com cenderung mengutamakan kecepatan, stabilitas narasi, serta akses terhadap sumber resmi. Akibatnya, ruang untuk menghadirkan perspektif kritis dan konflik kepentingan menjadi terbatas, sehingga framing yang dihasilkan lebih bersifat legitimatif terhadap kebijakan pemerintah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis hanya mencakup 8 berita dari satu media (Detik.com) dalam periode waktu terbatas (Juli–Agustus 2024), sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati. Kedua, penelitian ini tidak menganalisis secara mendalam proses produksi berita di redaksi Detik.com, sehingga interpretasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi framing masih bersifat inferensial berdasarkan analisis teks dan teori. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antar media dengan struktur kepemilikan yang berbeda, serta penelitian etnografi redaksi untuk memahami secara langsung dinamika produksi berita di media daring.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, A., & Sitoningrum, N. D. (2024, July 18). HGU 190 Tahun buat Investor IKN, Bagaimana Nasib Masyarakat? <https://mongabay.co.id/2024/07/18/hgu-190-tahun-buat-investor-ikn-bagaimana-nasib-masyarakat/>
- Bagdikian, B. H. (2004). *The New Media Monopoly*. Beacon Press.

- Devan Fairuz Insani, & Ahmad Zamzamy. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Media Online CNBC Indonesia.com dan Kompas.com Mengenai Dampak Lingkungan Pemindahan Ibu Kota Negara. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 2981–2993. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3806>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eriyanto. (2022). Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. LKIS Yogyakarta.
- Fauziati, C. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Media Daring tentang Citra Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pandemi Covid-19 (Kompas.Com Dan Detik.Com). *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 24(2), 207–222. <https://doi.org/10.20422/jpk.v24i2.739>
- Firman, & Rahmawati, R. (2025). Media Ownership and Democracy Processes in Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 20(1), 35–46. <https://doi.org/10.14203/jpp.v20i1.1446>
- GoodStats. (2024). 10 Portal Berita Online Yang Paling Sering Digunakan di Indonesia 2024. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/10-portal-berita-online-yang-paling-sering-digunakan-di-indonesia-2024-CH3pu>
- Haryanto, I. (2020). Media Ownership and Democracy in Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2).
- HLPE. (2011). Price Volatility and Food Security. FAO / Committee on World Food Security. https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE-price-volatility-and-food-security-report-July-2011.pdf :contentReference[oaicite:2]%7Bindex=2%7D
- Humas, I. (2023). Daftar 15 Merek Media Asal Indonesia yang Paling Dipercaya Publik Tahun 2023. *Humas Indonesia*. <https://humasindonesia.id/berita/daftar-15-merek-media-asal-indonesia-yang-paling-dipercaya-publik-tahun-2023-1450>

- Insani, F. N., & Zamzamy, P. A. (2023). Framing Dampak Lingkungan Pemindahan IKN pada CNBCIndonesia.com dan Kompas.com. *Jurnal Komunikasi Lingkungan*, 8(2).
- Ismandianto, I., Wahidar, T. I., & Devitriana, N. (2022). Nilai Berita Pada Pemberitaan Bisnis Portal Bertuahpos.Com. *Medium*, 9(2), 136–147. [https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9\(2\).7911](https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9(2).7911)
- Jefkins, F. (1992). *Public Relations* (4 (ed.)). Pitman. https://books.google.co.id/books/about/Public_Relations.html?hl=id&id=NQpgSQAACAAJ
- Kylie, J. Y., & Azizullah, M. N. (2025, October 24). HGU di IKN Hampir 2 Abad: Kepentingan Rakyat atau Investor? <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/hgu-di-ikn-hampir-2-abad-kepentingan-rakyat-atau-investor/>
- Lim, M. (2012). *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia*. Ford Foundation.
- McCombs, M. (2004). *Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion*. Polity Press.
- Mosco, V. (2009). *The Political Economy of Communication* (2nd ed.). SAGE Publications. https://books.google.co.id/books/about/The_Political_Economy_of_Communication.html?hl=id&id=v0ZIXfN0VqMC&redir_esc=y
- Protest, D. L., & McCombs, M. (Eds.). (1991). *Agenda Setting: Readings on Media, Public Opinion, and Policymaking*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Rogers, E. M., & Dearing, J. W. (1988). Agenda-Setting Research: Where Has It Been? Where Is It Going? In R. P. Hawkins & J. M. Wiemann (Eds.), *Communication Yearbook*. Routledge/Taylor & Francis. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203856192-37/agenda-setting-research-going-everett-rogers-james-dearing>
- Suciyati Quraini Ramadhani, Aurelius Rofinus Lolong Teluma, M. (2025). Analisis Framing pada Pemberitaan Pemindahan Ibu Kota Negara di Detik.com Periode 11 Juli–25 Agustus 2022 [Universitas Mataram].

https://eprints.unram.ac.id/50145/2/JURNAL_Suciyati_Quraini_Ramadhani_L1B018110.pdf

Tapsell, R. (2017). *Media Power in Indonesia: Oligarchy, Citizens and the Digital Revolution*. Rowman & Littlefield.

Welan, S. (2025, April 16). *Pembangunan IKN: Ancaman Nyata bagi Kelangsungan Hidup Masyarakat Adat Suku Balik*. <https://www.aman.or.id/news/read/2063>

Zaklama, S. (2025). *European Modern Studies Journal*. 9(1), 75–89. [https://doi.org/10.59573/emsj.9\(1\).2025.7](https://doi.org/10.59573/emsj.9(1).2025.7)